



► TEMUAN DPRD JOGJA

Warga Miskin Berisiko Kehilangan Bansos

JOGJA—Akurasi pendataan warga dalam penentuan desil yang menjadi dasar pemberian sejumlah bantuan sosial menjadi perhatian Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja Solihul Hadi. Dari hasil turun langsung ke lapangan, ia menemukan sejumlah proses pendataan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual.

Temuan tersebut didapat saat Solihul menemui sejumlah warga di Kampung Jogoyudan, Kemantren Jetis, Kamis (27/8).

Menurutnya, petugas pendata masih menemukan sejumlah persoalan teknis, dari pencatatan kepemilikan barang hingga kondisi tempat tinggal warga.

“Ada kendaraan yang sebenarnya lungsuran [hibah] dari keluarga untuk dirawat, bukan hasil pembelian pribadi, tapi langsung dicatat sebagai aset kepemilikan. Bahkan ada barang-barang hasil doorprize yang ikut dihitung,” ujarnya, Kamis (27/8).

Ia juga menemukan kondisi rumah warga yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tampilan fisik bangunan. Beberapa di antaranya rumah berkeramik yang sekilas terlihat layak, namun dihuni lima kepala keluarga (KK) secara berdesakan atau *ngindung* dalam petak-petak kamar sempit.

Selain itu, menurutnya, kesalahan teknis juga ditemukan dalam pendataan fasilitas dasar. Solihul mencontohkan kloset jongkok yang tercatat sebagai kloset duduk serta daya listrik 900 VA

Ini menyangkut kebutuhan dasar warga yang tidak bisa ditunda. Kami di Komisi D akan mendorong adanya solusi konkret dan mekanisme verifikasi yang cepat agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan amanat undang-undang untuk melindungi warga miskin tetap terjaga.

Solihul Hadi
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja

yang dikategorikan sebagai 1.300 VA.

Menurutnya, kesalahan dalam memasukkan data tersebut berpotensi membuat penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Dampaknya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan dapat kehilangan akses terhadap sejumlah program perlindungan sosial.

“Ini menyangkut kebutuhan dasar warga yang tidak bisa ditunda. Kami di Komisi D akan mendorong adanya solusi konkret dan mekanisme verifikasi

yang cepat agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan amanat undang-undang untuk melindungi warga miskin tetap terjaga,” katanya.

Solihul meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja segera melakukan pengecekan ulang terhadap data warga yang dinilai tidak sesuai. Perbaikan data juga dinilai perlu difasilitasi secara kontinu sehingga masyarakat tidak harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan pembaruan status.

Ia menegaskan persoalan pendataan tersebut akahi dibawa ke tingkat legislatif untuk dievaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, mekanisme verifikasi lapangan perlu diperkuat agar penetapan desil benar-benar berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga.

Salah satu warga Kampung Jogoyudan, Suwarno, 70, mengaku mengalami persoalan serupa. Lansia yang hidup seorang diri dan merupakan penyandang disabilitas tersebut justru tercatat dalam desil 10 atau kategori warga yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi sangat tinggi.

Suwarno berharap penetapan desil terhadap dirinya dapat disesuaikan dengan kondisi riil. Ia juga meminta dilakukan verifikasi ulang secara faktual di lapangan karena menilai data yang tercantum saat ini tidak objektif. “Saya tidak pernah disurvei, tapi tiba-tiba [saya] dicatat desil 10,” katanya. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005